

## **Persepsi Warga Sekolah terhadap Praktik Demokrasi di SMA Muhammadiyah 1 Taman Kabupaten Sidoarjo (Studi Pemilihan Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah)**

**Muhammad Adib<sup>1</sup>, Maya Mustika Kartika Sari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Surabaya

e-mail: [vma.indo16@gmail.com](mailto:vma.indo16@gmail.com)<sup>1</sup>, [mayamustika@unesa.ac.id](mailto:mayamustika@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi Warga Sekolah terhadap Praktik Pendidikan Demokrasi melalui Pemilihan Ketua IPM di SMA Muhammadiyah 1 Taman Kabupaten Sidoarjo secara deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen dan wawancara mendalam. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, model data dan Penarikan/Verifikasi Kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Warga SMA Muhammadiyah 1 Taman mempersepsikan bahwa Pemilihan Ketua IPM merupakan regenerasi kepemimpinan dan memberikan pengalaman langsung untuk praktek berdemokrasi. Penerapan sistem formatur yang merupakan gabungan dari model pemilihan suara terbanyak dan musyawarah disambut dengan baik dan warga sekolah mempersepsikan bahwa nilai demokrasi yang meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berpartisipasi, kesetaraan atau egaliterianisme antar warga, rasa saling percaya dan kerja sama telah terlaksana dengan baik pada semua tahapan Pemilihan Ketua IPM.

**Kata kunci:** *Praktik Demokrasi, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Sistem Formatur.*

### **Abstract**

This study aimed to descriptively describe the perceptions of School Citizens towards Democratic Education Practices through the Election of the Muhammadiyah Student Association Chairperson at Senior High School of Muhammadiyah 1 Taman, Sidoarjo. The method used in this research was the qualitative method with a phenomenological approach. The data collection techniques and tools used were documents and in-depth interviews. Data analysis techniques used were data reduction, data model and conclusion drawing/verification. The results of this study shows that the residents of Senior High School of Muhammadiyah 1 Taman perceived that the election of the Chairperson of the Muhammadiyah Student Association is a leadership regeneration and provided a direct experience for democratic practice. The implementation of the formature system which is a combination of the majority vote election model and consensus is welcomed and school residents perceive that the value of democracy which includes freedom to express opinions, freedom to participate, equality or egalitarianism among citizens, mutual trust and cooperation has been well implemented at all stages of the election of the Chairperson of the association.

**Keywords:** *Democracy Practices, Muhammadiyah Student Associations, Formature System.*

### **PENDAHULUAN**

*The Economist Intelligence Unit* (dalam Adawiyah, 2020) melaporkan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan drastis. Pada tahun 2019, Indonesia berada

pada posisi ke-67 dari 167 negara dalam indeks demokrasi global dengan skor 6,48 poin dari skala 0 sampai 10. Pada tahun 2021, Indonesia mengalami peningkatan yang kurang signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu peringkat ke-52 dengan skor 6,71 pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke-64 dengan skor 6.30, sehingga penting untuk membangun budaya demokrasi yang mengakar pada semua tatanan masyarakat, meliputi keberlakuan nilai, prinsip dan kaidah demokrasi di masyarakat yang tercermin dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari maupun kenegaraan yang dapat dilakukan lewat pendidikan.

Pendidikan berperan vital dalam pengembangan demokrasi (Zamroni, 2011:165). Pendidikan yang mampu mengembangkan demokrasi adalah pendidikan dengan spirit demokrasi yang teraktualisasikan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan yang mampu mengembangkan demokrasi adalah pendidikan berkultur sekolah demokratis. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 yang berbunyi, "Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Berdasarkan tujuan pendidikan nasional di atas, maka seharusnya sekolah menerapkan prinsip demokrasi dalam praktik kesehariannya. Terciptanya warga negara demokratis dan bertanggung jawab melalui sekolah dapat terwujud dengan pengelolaan dan perencanaan yang menjadikan sekolah laboratorium demokrasi, seperti pendapat Yuniarto (2018:97) bahwa pendidikan persekolahan semestinya dikembangkan sebagai wahana sosiokultural untuk membangun kehidupan demokratis. Maka, dapat dipahami bahwa sekolah harus menjadi wahana pendidikan untuk mempersiapkan kewarganegaraan demokratis melalui pengembangan kecerdasan spiritual, rasional, emosional, dan sosial warga negara, baik sebagai aktor sosial maupun sebagai pemimpin pada hari ini dan esok. Lebih lanjut, mengacu pada pendapat Cipto, dkk. (dalam Tukiran, dkk., 2017), ada enam nilai demokrasi, yaitu adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkelompok, berpartisipasi, kesetaraan atau egaliterianisme antar warga, rasa saling percaya dan kerja sama, yang mana bisa diterapkan dalam pelaksanaan praktik demokrasi di sekolah.

Salah satu praktik demokrasi yang bisa dilakukan di sekolah adalah pemilihan ketua OSIS, yang mana juga dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Taman. Namun, sekolah tersebut berbeda dengan sekolah lainnya, karena Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) bertindak sebagai substitusi OSIS. Hal tersebut didasari oleh Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah No. 510/SK.PP/III.A/16/1997. Surat keputusan tersebut mengatur bahwa IPM wajib menggantikan fungsi dari OSIS di lingkungan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Keberadaan IPM tidak mengganggu jalannya proses demokratisasi dan menjadi angin segar dalam pelaksanaan demokratisasi di SMA Muhammadiyah 1 Taman, karena adanya mekanisme pertanggungjawaban pimpinan IPM kepada seluruh warga sekolah setiap semester.

Selain itu, dalam pemilihan ketua IPM juga menggunakan sistem yang berbeda, yaitu sistem formatur yang merupakan gabungan dari pemilihan suara terbanyak melalui *voting* elektronik dan musyawarah, sehingga memungkinkan adanya lebih banyak variasi calon pemimpin. Proses pemilihan melibatkan seluruh siswa yang tidak hanya memberikan suara pada satu orang, akan tetapi kepada beberapa orang calon ketua, sehingga ketua umum sulit ditebak dari awal. Model musyawarah formatur ini mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dalam penentuan ketua umum. Sistem pemilihan formatur bertujuan untuk menghasilkan beberapa orang dengan suara tertinggi untuk dijadikan tim formatur. Pemilik suara akan memilih sesuai dengan jumlah formatur yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, apabila tim formatur ditentukan jumlahnya adalah tujuh orang, maka setiap pemilik suara memilih tujuh orang dari daftar calon kandidat tim formatur. Setelahnya, suara dihitung dan dipilih tujuh suara tertinggi untuk menjadi tim formatur yang nantinya bermusyawarah untuk menghasilkan struktur pimpinan baru.



**Gambar 1 Ilustrasi Pemilihan Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah**

Dengan demikian, model formatur bisa dipahami sebagai jalan ketiga atau penengah antara *voting* dan permusyawaratan dan/atau penunjukkan langsung. *Voting* mengerucutkan pilihan suara hanya pada satu orang dan mendikotomikan kelompok mayoritas dan minoritas, sedangkan musyawarah berpotensi untuk sulitnya menemukan jalan keluar dengan mudah, karena perbedaan persepsi dan argumentasi anggota musyawarah. Sesuai dengan pendapat Giddens (1998) bahwa Politik Jalan Ketiga adalah solusi penengah antara kaum kiri dan kanan dalam demokrasi sosial. Jalan ketiga Giddens memiliki nilai kesetaraan, perlindungan terhadap kaum yang lemah, kebebasan sebagai suatu otonomi individu, tidak adanya hak tanpa tanggung jawab, tidak adanya kewenangan tanpa demokrasi, pluralisme kosmopolitan, dan konservatisme filosofis.

Selain itu, para siswa SMA Muhammadiyah 1 Taman tidak hanya merupakan lulusan SMP/Sederajat milik Persyarikatan Muhammadiyah, tetapi sebagian siswa ada juga yang merupakan alumni dari SMP/Sederajat Negeri dan swasta milik yayasan lain, sehingga persepsi warga sekolah terhadap pemilihan ketua IPM juga semakin beragam. Oleh karena itu, muncul rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Persepsi Warga Sekolah terhadap Praktik Demokrasi melalui Pemilihan Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 Taman Kabupaten Sidoarjo? Tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan Persepsi Warga Sekolah terhadap Praktik Demokrasi melalui Pemilihan Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 Taman secara deskriptif. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini secara teoretis adalah diharapkan mampu memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang Persepsi Warga Sekolah terhadap Praktik Pendidikan Demokrasi melalui Pemilihan Ketua Organisasi, sedangkan manfaat praktisnya yaitu (1) diharapkan mampu berkontribusi nyata bagi masyarakat agar memahami serta mengimplementasikan nilai demokrasi di kehidupan sehari-hari, dan (2) diharapkan mampu berkontribusi bagi pemerintah dalam mengkaji dan merumuskan kurikulum yang lebih relevan dengan pendidikan demokrasi di Indonesia.

Berkaitan dengan relevansi penelitian, terdapat empat penelitian terdahulu sebagai berikut. Pertama, Sarbini, dkk. (2015) menunjukkan bahwa pemilihan ketua OSIS di SMA KORPRI Banjarmasin tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui LDKS yang selanjutnya diadakan musyawarah mufakat oleh pengurus OSIS periode sebelumnya untuk menentukan kandidat ketua dan pengurus inti OSIS. Kedua, Nurdin dan Khoirul (2020) menunjukkan bahwa pendidikan politik di SMAN 1 Binjai telah berhasil, karena siswa telah memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dan melalui pemilihan ketua OSIS, siswa mampu mengaktualisasikan pemahamannya mengenai demokrasi yang didapatkan dari pelajaran PPKn dan media sosial dan elektronik. Ketiga, Asmaroni dan Prihma (2017) menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi di sekolah di Kabupaten Ponorogo dilaksanakan dengan cara yang sama oleh setiap sekolah, yaitu pendidikan demokrasi yang berorientasi kepada siswa. Guru mengarahkan siswa untuk menerapkan praktik demokrasi antara lain: diskusi kelompok, berpendapat, musyawarah, pemilihan ketua kelas, pemilihan pengurus kelas, pemilihan ketua OSIS (SMA umum), pemilihan Ketua IPM dan *Hizbul Wathan* (SMA Muhammadiyah), Pemilihan ketua OSDA (SMA Pondok Darut Taqwa), pemilihan Dewan Ambalan (DA), *voting*, kerja bakti, bakti sosial, pemilihan ekstrakurikuler, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Keempat, Budiarti (2017) menunjukkan bahwa Pemilihan Ketua

OSIS di SMPN 38 Semarang tahun 2016 menghasilkan pengaruh yang baik, yang ditunjukkan oleh pemahaman siswa terhadap arti penting nilai demokrasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang berfokus untuk mengungkap makna, konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu yang mengalami suatu fenomena tertentu. Fenomenologi berupaya mendeskripsikan kesamaan beberapa individu saat mengalami atau terlibat dalam fenomena tertentu (Creswell, 2007:58).

**Tabel 1 Nama dan Jabatan Informan yang dipilih**

Nama	Jabatan
Edwin Yogi Laayrananta, M.I.Kom.	Direktur Sekolah.
Wahyu Bimas Kurniasandi, S.I.Kom.	Waka Kesiswaan.
Imara Alhamani, S.S.	Guru
Fakhrul Azzami, S.AP., M. KP.	Staf Tata Usaha Sekolah
Azhar Nasrullah	Tenaga Keamanan (Satpam)
Azzura Muthia Jasmine	Ketua IPM Periode 2022-2023
Muhammad Dafi Irwansyah	Ketua IPM Periode 2021-2022
Kanaya Putri Salsabila	Siswa Kelas 12 IPA 3
Kharisma Amalia Eka Putri	Siswa Kelas 11 IPS 2
Andi Ichlasul D'amal	Siswa Kelas 10 IPA 1

Teknik dan alat untuk pengambilan data berasal dari berbagai sumber, yaitu dokumen dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan bersumber dari pendapat Miles dan Huberman (dalam Emzir, 2010:129-135), yaitu reduksi data, *data display* dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Demokrasi melalui Pemilihan Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berprinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokrasi sejak masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Perubahan komponen pemerintahan yang terjadi dimasa itu merupakan penguatan indonesia sebagai negara demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan pemilihan unsur pemerintahan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Selain itu, adanya pembagian kekuasaan secara eksekutif, legislatif dan yudikatif juga merupakan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi.

Ada dua kunci penting dalam demokrasi yaitu, Kebebasan dan Sukses kepemimpinan. Kebebasan pada kunci demokrasi merupakan nilai nilai demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Cipto yaitu meliputi kebebasan berpendapat, berpartisipasi, berkelompok, kesetaraan, rasa percaya dan kerjasama. Sukses kepemimpinan merupakan proses untuk tetap menjaga iklim demokrasi melalui adanya pergantian kepemimpinan secara berkala untuk menghindari munculnya kepemimpinan abadi yang dikuasai oleh kelompok tertentu, sehingga memunculkan kepemimpinan otoriter.

Iklim demokrasi yang ada dalam negara yang menganut demokrasi harus diimplementasikan pada semua aspek bernegara. Salah satunya melalui Pendidikan. Pendidikan merupakan usaha secara sadar dan terencana untuk membentuk kepribadian seseorang. Seseorang dapat dibentuk karakter, sikap dan pengetahuannya melalui pendidikan. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi, "Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Pembentukan warga negara yang demokratis menjadi tujuan penting bagi pendidikan di Indonesia. Pembelajaran proses demokrasi di sekolah menjadi suatu hal

yang mutlak untuk diterapkan. Pengalaman demokrasi bagi peserta didik dapat menjadi bekal untuk siswa pada proses bermasyarakat dan bernegara di kemudian hari. Pembelajaran proses demokrasi pada sekolah banyak ditemukan pada proses intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Pada pembelajaran ekstrakurikuler proses demokrasi dilakukan melalui organisasi siswa. Organisasi Siswa memiliki berbagai nama, seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah, Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU), dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Pada organisasi tersebut, siswa banyak diberikan pembelajaran demokrasi melalui berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat serta pemilihan pengurus yang dilakukan secara berkala.

Keberadaan IPM di SMA Muhammadiyah 1 Taman merupakan pelaksanaan demokratisasi yang ada di sekolah. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya mekanisme pertanggungjawaban kepengurusan IPM kepada seluruh masyarakat sekolah. Proses tersebut dilakukan setiap enam bulan sekali. Artinya, dalam satu tahun periode kepengurusan, terdapat setidaknya dua kali kegiatan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan menerima masukan dari warga sekolah yang berkaitan dengan kinerja Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kegiatan tersebut bernama Musyawarah IPM dan Konferensi IPM.

Dalam kegiatan Konferensi IPM, pengurus IPM akan mempertanggungjawabkan kinerjanya selama setengah periode kepengurusan, sementara Musyawarah IPM dilakukan dalam rangka pergantian kepengurusan. Kepengurusan lama akan mempertanggungjawabkan kinerjanya selama satu tahun kepengurusan, menyerap aspirasi warga sekolah untuk dijadikan rekomendasi kerja bagi kepengurusan baru, dan memimpin jalannya proses pemilihan kepengurusan baru.

Pada umumnya, pemilihan pimpinan sebuah organisasi dilakukan dengan cara meraih suara tertinggi. Model pemilihan dengan suara mayoritas mutlak banyak digunakan. Hampir semua organisasi intra sekolah melakukan pemilihan pimpinan melalui mekanisme voting atau pemungutan suara terbanyak. Model suara terbanyak dipilih dengan alasan bahwa suara terbanyak adalah representasi dari keseluruhan anggota, sehingga prinsip demokrasi dianggap telah terimplementasikan dengan baik. Akan tetapi, Ikatan Pelajar Muhammadiyah di SMA Muhammadiyah 1 Taman menerapkan model pemilihan yang berbeda, yaitu menggunakan model pemilihan musyawarah formatur. Pemilihan dengan model musyawarah formatur merupakan gabungan dari pemilihan suara terbanyak dan musyawarah, akan tetapi model ini sedikit dimodifikasi, sehingga dapat memungkinkan adanya variasi calon pemimpin yang lebih banyak. Model musyawarah formatur ini, mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dalam menentukan ketua umum. Pada SMA Muhammadiyah 1 Taman pembelajaran proses demokrasi melalui pemilihan pengurus ikatan pelajar muhammadiyah dilakukan secara berkala. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan dimaksudkan untuk memberikan pengalaman untuk berdemokrasi secara langsung.

Penerapan sistem formatur adalah formula baru untuk model pemilihan yang ada, berawal dari dilema dengan konsekuensi voting yang dapat melahirkan pemimpin yang dikehendaki mayoritas kelompok dan berpotensi mengabaikan kaum minoritas, sehingga pemimpin tersebut adalah kuasa mayoritas yang kebijakannya menguntungkan kaum mayoritas dan merugikan minoritas. Dilema lainnya, apabila dengan penerapan sistem pemilihan melalui penunjukan secara langsung dapat menimbulkan kegaduhan masyarakat di bawah. Sosok yang dipilih bukanlah representasi masyarakat, tetapi sesuai selera penguasa. Dari dilema tersebut, sistem formatur menjadi jalan tengah atau ketiga untuk menghadapi dilema kegagalan sistem yang lain.

Teori Giddens (1998) tentang Politik Jalan Ketiga memiliki tujuh nilai, yaitu kesetaraan, perlindungan terhadap kaum yang lemah, kebebasan sebagai suatu otonomi individu, tidak adanya hak tanpa disertai tanggung jawab, tidak adanya kewenangan/otoritas tanpa disertai dengan demokrasi, pluralisme kosmopolitan, dan konservatisme filosofis. Berkaitan dengan nilai-nilai Politik Jalan Ketiga Giddens, maka terdapat kesesuaian antara pemilihan ketua IPM di SMA Muhammadiyah 1 Taman dengan nilai politik Jalan Ketiga Giddens.

Pertama, Kesetaraan. Pemilihan Ketua IPM di SMA Muhammadiyah 1 Taman memiliki nilai kesetaraan, di mana semua warga sekolah setara dalam memilih calon ketua IPM. Selain itu, siswa juga memiliki hak yang setara dengan teman-teman sebayanya untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai ketua IPM.

Kedua, Perlindungan terhadap kaum yang lemah. Pemilihan ketua IPM di SMA Muhammadiyah 1 Taman memiliki nilai perlindungan terhadap kaum minoritas yang terwujud dalam sistem formatur yang digunakan dalam proses pemilihan ketua IPM. Sistem formatur mengakomodasi pemilihan calon ketua dengan memilih lebih dari satu orang, sehingga tidak ada perbedaan menonjol di antara para formatur terpilih. Hal tersebut berimplikasi pada berkurangnya kesenjangan antar anggota formatur.

Ketiga, Kebebasan sebagai suatu otonomi individu. Siswa memiliki kebebasan secara individu dalam pemilihan ketua IPM. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya kebebasan untuk berpendapat, terutama ketika melaksanakan musyawarah ranting.

Keempat, tidak ada hak tanpa tanggung jawab, yang secara garis besar adalah unsur kebebasan berpendapat dalam pemilihan ketua IPM, yang berfungsi untuk melatih siswa untuk berpikir secara matang dan bertanggung jawab atas keinginannya. Sebagai tambahan, dalam berpendapat saat bermusyawarah, ada hal yang perlu diperhatikan, seperti mengedepankan etika, lalu belajar dahulu selama setahun untuk mendengarkan pendapat orang lain ketika kelas 10 dan menghargai hak orang lain. Etika juga perlu dijunjung, sebab SMA Muhammadiyah 1 Taman adalah sekolah yang memiliki identitas sebagai sekolah Islam. Hal tersebut bertujuan untuk mendewasakan para siswa agar lebih mengerti tanggung jawab.

Kelima, Tidak adanya otoritas tanpa disertai dengan demokrasi. Otoritas yang dimiliki pihak sekolah terwujud dalam adanya demokrasi yang diterapkan di sekolah. Ketika meregulasikan aturan yang berlaku, pihak sekolah membuka kesempatan untuk bermusyawarah dengan perwakilan siswa. Musyawarah yang dilakukan dilaksanakan setahun sekali bernama Sagakura untuk menampung aspirasi siswa terkait permasalahan yang terjadi di sekolah.

Keenam, Pluralisme Kosmopolitan, yang berkaitan dengan perbedaan latar belakang siswa. Ada siswa yang lulus dari lembaga pendidikan SMP/Sederajat milik Peryarikatan Muhammadiyah, juga ada siswa lulus dari SMP/Sederajat Negeri atau Swasta milik yayasan lain. Para siswa tersebut setara dalam berbagai kegiatan sekolah tanpa ada perbedaan, seperti kegiatan akademik dan non akademik, di mana kegiatan non akademik juga meliputi berorganisasi dalam IPM dan turut serta berpartisipasi dalam pemilihan ketua IPM.

Ketujuh, Konservatisme Filosofis. Konservatisme dalam pemilihan ketua IPM tidak menutup mata terhadap modernitas, sembari menjaga lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini, voting untuk memilih tim formatur dilaksanakan secara elektronik (e-vote) yang tidak membuang banyak kertas untuk pelaksanaan pemilihan. Kemudian, warga sekolah juga berperilaku konservatif, yaitu mempertahankan nilai Islam dalam pelaksanaan pemilihan ketua IPM, seperti tidak berbuat curang dan bermusyawarah secara etis dengan tidak berkata kasar, dll.

### **Persepsi Warga Sekolah terhadap Praktik Demokrasi melalui Pemilihan Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah**

Persepsi didefinisikan sebagai proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu diteruskan kepada ingatan individu (Walgito, 2004:88). Persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu individu pemersepsi, sasaran persepsi dan situasi (Robbins, 1996:124). Sedangkan warga sekolah merupakan seluruh civitas akademika yang meliputi pimpinan, guru, tenaga kependidikan dan tenaga keamanan. Persepsi warga sekolah ditujukan untuk menggali pandangan warga sekolah terhadap praktik demokrasi yang berjalan melalui pemilihan ketua IPM. Persepsi yang digali berfokus pada pandangan umum, Penerapan sistem formatur dan implementasi nilai-nilai demokrasi yang dikemukakan oleh Cipto dkk. (dalam Tukiran, dkk., 2017), yaitu

meliputi kebebasan berpendapat, berpartisipasi, berkelompok, kesetaraan, rasa percaya dan kerjasama.

Secara umum, warga sekolah memandang pemilihan ketua IPM merupakan pemilihan yang demokratis. Hal tersebut ditandai dengan adanya regenerasi/suksesi kepemimpinan dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengimplementasikan demokrasi secara nyata. Pergantian pengurus IPM terjadi setiap tahunnya terjadi karena Bapak Fakhru menganalogikan pemilihan ketua IPM dengan pilpres, bahwa setiap presiden ada masanya untuk berkuasa dan digantikan oleh presiden berikutnya, begitu juga dengan IPM yang di dalamnya harus ada pergantian kekuasaan. Selain itu, Kanaya juga menambahkan bahwa siswa harus fokus kepada tujuan awalnya secara akademik, yaitu kelas 12 harus berfokus kepada berbagai ujian demi mempersiapkan kelulusan siswa dari SMA Muhammadiyah 1 Taman.

Selanjutnya, sisi demokratis dari pemilihan Ketua IPM di SMA Muhammadiyah Taman mencakup saling menghargai hak dan bersikap egaliter di antara para warga sekolah. Bapak Yogi menjelaskan bahwa sikap egaliter dan saling menghargai hak diajarkan kepada siswa sejak dini, yaitu pada saat masih kelas 10 dengan cara belajar mendengarkan pendapat terlebih dahulu dan belum diberi hak bersuara ketika rapat musyawarah ranting IPM, karena Bapak Yogi tidak ingin siswa menjadi pribadi otoriter ketika nantinya memiliki hak bersuara. Lebih lanjut, perwakilan siswa juga diajak oleh pihak sekolah untuk meregulasikan aturan-aturan yang berlaku di sekolah, seperti melonggarkan atau memperberat hukuman yang perlu diterima oleh siswa bila melakukan suatu pelanggaran tertentu.

Penerapan sistem formatur pada pemilihan ketua IPM dipandang sebagai sebuah sistem yang mencerminkan demokrasi yang sebenarnya. Hal tersebut dapat diketahui dari persepsi Bapak Yogi, yang mana di dalam sistem formatur terdapat proses berdiskusi dan bermusyawarah yang menjadi bagian dari intelektualitas dalam berdemokrasi, sehingga bisa dipahami bahwa sistem formatur dipandang lebih baik dan efektif dari pada pemungutan suara yang memilih satu orang saja. Azzura menjelaskan mekanisme sistem formatur berdasarkan pengalaman yang dialaminya saat terpilih menjadi ketua IPM, yaitu ada 11 orang siswa kandidat ketua IPM yang menyampaikan visi misinya dalam forum terbuka, setelah itu ada sesi tanya jawab seputar visi misinya tersebut. Kemudian, para pemilih melakukan *voting* untuk memilih sembilan dari 11 orang siswa tersebut. Setelah sembilan siswa itu terpilih, kemudian sembilan siswa tersebut melakukan musyawarah mufakat untuk menentukan siapa yang bersedia menjadi ketua IPM.

Akan tetapi, terdapat persepsi lain bahwa sistem formatur dirasa membingungkan untuk pertama kali, sehingga perlu beradaptasi dahulu dengan sistem formatur. Hal tersebut disampaikan Andi, siswa kelas 10 yang berlatarbelakang sebagai siswa lulusan SMP yang dinaungi oleh lembaga lain, sehingga bisa dipahami bahwa sistem formatur adalah ciri khas serta kearifan lokal dalam pemilihan ketua organisasi di lembaga-lembaga Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk SMA Muhammadiyah 1 Taman.

Pada proses demokrasi di SMA Muhammadiyah 1 Taman telah menjaga nilai nilai demokrasi. Penjagaan nilai demokrasi ditujukan untuk menghadirkan pengalaman baik bagi peserta didik dan kualitas kepemimpinan yang baik. Nilai demokrasi yang difokuskan pada penelitian ini adalah nilai kebebasan berpendapat, berpartisipasi, berkelompok, kesetaraan, rasa percaya dan kerjasama. Nilai tersebut dijabarkan pada hal berikut.

Pertama, kebebasan berpendapat. Secara garis besar, ada unsur kebebasan berpendapat dalam pemilihan ketua IPM. Kebebasan berpendapat dalam pemilihan ketua IPM juga melatih siswa untuk lebih berpikir secara dewasa dan bertanggung jawab dengan apa yang diinginkannya. Bapak Yogi menyebutkan adanya hal yang perlu diperhatikan dalam berpendapat saat bermusyawarah, seperti mengedepankan etika, belajar terlebih dahulu selama setahun untuk mendengarkan pendapat orang lain ketika kelas 10 dan menghargai hak orang lain. Bapak Yogi menekankan pentingnya menjunjung etika ketika berpendapat, sebab SMA Muhammadiyah 1 Taman adalah sekolah yang beridentitas sebagai sekolah swasta Islam, Sedangkan Ibu Imara menyebutkan bahwa kebebasan

berpendapat adalah hal yang baik, sebab hal tersebut adalah sesuatu yang bagus untuk proses pendewasaan diri siswa. Dalam musyawarah ranting saat pemilihan ketua IPM, Andi menjelaskan bahwa dalam musyawarah tersebut terdapat kesempatan untuk memberikan kritik terhadap laporan pertanggungjawaban IPM periode sebelumnya. Kritik yang diberikan oleh siswa dilakukan secara bergantian oleh tiap siswa yang menjadi perwakilan kelas.

Tidak hanya dalam ber-IPM, menurut Bapak Bimas, siswa juga bebas untuk berpendapat saat bermusyawarah dengan pihak sekolah saat menentukan aturan dan tata tertib sekolah. Musyawarah tersebut tidak dihadiri oleh semua siswa, melainkan dihadiri oleh beberapa orang siswa yang menjadi perwakilan teman-temannya. Implementasi kebebasan berpendapat dan bermusyawarah, menurut Bapak Bimas adalah salah satu cara untuk pengajaran kepada siswa mengenai praktik demokrasi. Kharisma menyebutkan bahwa ada pelaksanaan acara yang dimaksud oleh Bapak Bimas yang dinamakan Sagakura yang dilaksanakan untuk sarana siswa dan guru untuk saling berdialog yang membicarakan berbagai permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan sekolah. Akan tetapi, menurut Azzura, beberapa siswa masih merasa malu untuk menyampaikan pendapatnya, meskipun sekolah telah memberikan peluang dan kesempatan yang lebar bagi siswa untuk menyampaikan pendapatnya.

Kedua, kebebasan berpartisipasi. Poin yang dapat ditemukan dari persepsi para warga sekolah di samping adalah ada kebebasan berpartisipasi untuk ikut serta dalam pemilihan ketua IPM. Berpartisipasi dalam pemilihan ketua IPM tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi calon ketua IPM. Dalam hal menjadi calon ketua IPM, Bapak Bimas dan Azzura menyebutkan beberapa syarat yang harus dilakukan oleh siswa, seperti mengikuti seleksi berupa wawancara, hafal Janji Pelajar Muhammadiyah, mengikuti latihan perkaderan bernama Taruna Melati, dan lain sebagainya. Kemudian, Dafi menjelaskan bahwa untuk memilih ketua IPM hampir semua warga sekolah ikut memilih, seperti siswa, guru dan staf tata usaha.

Lebih lanjut, berpartisipasi dalam pemilihan ketua IPM tidak hanya berkuat soal memilih atau dipilih, tetapi juga seperti rasa ikut berpartisipasi secara tidak langsung dalam kegiatan tersebut. Bapak Azhar selaku satpam sekolah merasakan bahwa tanggung jawab sebagai petugas keamanan sekolah juga termasuk peran dalam berpartisipasi dalam pemilihan ketua IPM, di mana tugasnya menjaga kendaraan di tempat parkir agar tidak hilang atau dicuri.

Ketiga, kebebasan berkelompok. SMA Muhammadiyah 1 Taman membebaskan siswa untuk menyatu dengan kelompok yang diinginkannya. Dalam hal berkelompok, ada persepsi yang secara garis besar sama, yaitu adalah tentang kebebasan para anggota IPM untuk berkelompok dengan rekan seorganisasi, baik berkelompoknya anggota IPM secara keseluruhan ataupun berkelompok hanya dengan teman satu bidangnya. Bapak Yogi menilai bahwa kebebasan berkelompok siswa anggota IPM meliputi kebebasan untuk menentukan program kerja atau kegiatan, termasuk menentukan kepanitiaan dalam pemilihan ketua IPM. Hal tersebut bebas untuk dilakukan, selama memiliki nilai positif dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain.

Lebih lanjut, dalam berkelompok dengan rekan sesama anggota dan pengurus IPM, Dafi memberikan rincian bahwa siswa yang memiliki minat dan bakat tertentu, bisa memilih bidang yang disukainya di IPM. Contoh yang diberikan oleh Dafi adalah siswa yang memiliki minat di bidang olah raga, maka siswa tersebut boleh untuk masuk atau bergabung dengan bidang ASBO (Apresiasi Seni Budaya dan Olah Raga) di IPM. Selain itu, Azzura juga memberikan informasi bahwa siswa yang bergabung dengan IPM juga dipengaruhi oleh ketertarikan untuk bergabung dengan IPM, karena sahabat atau teman dekatnya juga mengikuti IPM.

Keempat, kesetaraan. Ada sebuah garis besar yang dapat disimpulkan dari persepsi warga sekolah, yaitu adanya kesetaraan dalam mencalonkan diri sebagai ketua IPM, kesetaraan dalam menyampaikan pendapat dan kesetaraan dalam memilih calon ketua IPM. Kesetaraan dalam kegiatan Pemilihan Ketua IPM terdapat tiga bentuk, yaitu kesetaraan dalam mencalonkan diri sebagai ketua IPM, menyampaikan pendapat dan memilih calon

ketua IPM. Perihal kesetaraan dalam dalam hal mencalonkan diri sebagai Ketua IPM, Bapak Yogi menjelaskan bahwa siswa boleh untuk mencalonkan diri sebagai ketua IPM, selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, mengenai kesetaraan dalam hal berpendapat, siswa boleh untuk mengusulkan pendapatnya, dengan tetap mengikuti etika sebagai bentuk kepatuhan moral.

Azzura menjelaskan bahwa saat sesi musyawarah dalam pemilihan ketua IPM, siswa memiliki kesetaraan dalam menyampaikan pendapatnya. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Imara bahwa saat semua warga sekolah memiliki kesetaraan dalam menaati aturan dan tata tertib sekolah serta menyampaikan pendapat dan sarannya saat bermusyawarah. Terkait hak pilih, Kanaya dan Kharisma membenarkan adanya kesetaraan dalam hak pilih saat memilih ketua IPM, sebab keduanya merasakan bahwa tidak ada diskriminasi yang dirasakan saat memilih ketua IPM, sehingga keduanya dan teman-temannya memiliki hak yang sama untuk memilih ketua IPM.

Kelima, rasa percaya. Dalam pemilihan ketua IPM, terdapat rasa percaya yang dirasakan warga sekolah yang terdiri atas proses seleksi dan upaya pendampingan yang dilakukan oleh sekolah saat dilaksanakannya Pemilihan Ketua IPM, kepercayaan warga sekolah terhadap transparansi dalam proses pemungutan suara, serta rasa kepercayaan yang diperoleh para formatur terpilih dari warga sekolah lainnya. Dalam hal seleksi dan pendampingan, Bapak Yogi menjelaskan bahwa salah satu bentuk rasa percaya sekolah terhadap siswa dalam ber-IPM adalah adanya tahap seleksi saat mencalonkan diri sebagai anggota ataupun Ketua IPM. Pertama, siswa yang menjadi calon pimpinan harus setahun menjadi pengurus terlebih dahulu saat kelas 10. Jadi, siswa harus tahu kondisi dulu, lalu dipilih. Kedua, siswa haruslah ada di kelas 11, karena untuk kelas 12, siswa sudah mulai disibukkan dengan berbagai ujian. Sementara itu, seleksi menggunakan tes tulis dilaksanakan ketika calon mau masuk menjadi anggota IPM. Ketika mau mencalonkan diri sebagai ketua, maka tidak perlu ada tes tulis, karena sudah berpengalaman selama satu tahun di IPM. Selain itu, Bapak Bimas menyebutkan bahwa seleksi dan pendampingan ketat dilakukan karena sekolah tidak ingin siswa yang menjadi ketua IPM adalah siswa yang melenceng dan dipilih secara sembarangan.

Kemudian, transparansi dalam pemilihan ketua IPM berhubungan dengan kepercayaan terhadap panitia yang transparan dan tidak adanya kecurangan yang ditemukan dalam kegiatan tersebut. Ibu Imara menjelaskan bahwa meskipun tidak ada kecurangan, namun potensi akan kecurangan tetaplah ada, sebab *voting* yang dilakukan saat pemilihan ketua IPM dilakukan secara elektronik. Ibu Imara juga menekankan bahwa siapapun pelaku kecurangan dalam pemilihan ketua IPM, maka pelakunya tidak sejalan dengan visi dan misi sekolah yang sarat dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, Bapak Fakhrul juga menjelaskan bahwa rasa percaya warga sekolah terhadap transparansi pemilihan ketua IPM juga timbul karena sebelum pemilihan dilaksanakan, panitia telah disumpah untuk taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Menurut Kharisma, pemilihan ketua IPM juga tidak mungkin dilakukan dengan kecurangan, sebab pelaku kecurangan bisa dikeluarkan dari sekolah bila terbukti akan kecurangannya. Terakhir, pilihan yang diberikan siswa kepada temannya untuk menjadi tim formatur adalah bentuk kepercayaan yang diperoleh dari teman-temannya. Dafi menceritakan pengalamannya saat terpilih menjadi ketua IPM, karena teman-temannya melihat bahwa Dafi aktif untuk ber-IPM.

Keenam, kerjasama. Secara garis besar, ada satu persepsi yang sama di antara para warga SMA Muhammadiyah 1 Taman terkait dengan Kerjasama dalam Pemilihan Ketua IPM. Bapak Yogi memandang bahwa kerja sama yang dilakukan para siswa adalah mengerjakan tugas sebagai panitia saat acara Pemilihan Ketua IPM. Hal tersebut dibenarkan oleh warga sekolah lainnya, seperti Ibu Imara dan Kanaya. Keduanya memberikan contoh kerjasama para panitia sesuai tugas dan fungsinya, seperti ada yang bertugas menjadi MC (pembawa acara), menerima tamu, menata atau mendekorasi lokasi, menyiapkan konsumsi, mengarahkan pemilih untuk masuk ke bilik suara, dan lain-lain. Lebih lanjut, terdapat rasa kepuasan warga sekolah terhadap kinerja panitia pemilihan, yaitu apa

yang dirasakan oleh Kharisma, di mana pada saat H-1 acara, Kharisma melihat bahwa panitia menyiapkan acara dengan cepat, sehingga tidak sampai pulang larut malam.

Selain itu, secara tidak langsung, warga sekolah lainnya juga turut bekerja sama dalam pemilihan ketua IPM, seperti Satpam yang menjaga kendaraan yang diparkir di depan sekolah demi keamanan dan kondusivitas pelaksanaan kegiatan pemilihan ketua IPM. Hal tersebut dirasakan oleh Bapak Bimas, di mana Satpam telah bekerja dengan baik melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

**Tabel 4.1 Persepsi Warga Sekolah terhadap Praktik Demokrasi**

ASPEK	PERSEPSI
Pemilihan Ketua IPM	1. Pembelajaran Kepada Peserta Didik 2. Regenerasi Kepemimpinan
Penerapan Sistem Formatur	1. Budaya Pemilihan Ketua di Persyarikatan Muhammadiyah 2. Demokrasi berprinsip musyawarah Mufakat 3. Banyak model pemilihan yang lain (Alternatif)
Kebebasan Berpendapat	1. Bebas yang bertanggung jawab 2. Mengedepankan etika dan sopan santun
Kebebasan Berpartisipasi	1. Adanya kebebasan dalam memilih calon Ketua IPM 2. Adanya kebebasan dalam mencalonkan diri sebagai calon ketua IPM 3. Adanya kebebasan berkelompok dengan bersikap tidak saling menjatuhkan satu sama lain secara akademik dan non akademik.
Kesetaraan	1. Adanya Kesetaraan hak untuk berpendapat 2. Adanya Kesetaraan dalam memilih calon ketua
Rasa Percaya	1. Tidak ada kecurangan 2. Transparan
Kerjasama	1. Partisipasi para warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan Pemilihan Ketua IPM. 2. Pembagian Tugas yang adil

## SIMPULAN

Warga SMA Muhammadiyah 1 Taman mempersepsikan bahwa pemilihan ketua IPM bersifat demokratis, karena terdapat regenerasi kepemimpinan dan memberi pengalaman langsung untuk praktik berdemokrasi. Selanjutnya, nilai demokrasi seperti kebebasan untuk berpendapat, berpartisipasi, kesetaraan atau egaliterianisme antar warga, rasa saling percaya dan kerja sama telah terlaksana dengan baik pada semua tahapan Pemilihan Ketua IPM. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran penelitian ini ditujukan kepada penelitian selanjutnya adalah untuk menggali lebih dalam terkait dengan sistem formatur dengan membandingkannya dengan sistem yang lain. Kemudian, penelitian selanjutnya juga dapat menerapkan sistem formatur ke lingkup yang lebih luas dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Rabiatul. 2020. Indeks demokrasi Indonesia merosot tiga tahun terakhir. <https://lokadata.id/artikel/indeks-demokrasi-indonesia-merosot-tiga-tahun-terakhir> (Diakses pada 5 november 2020)
- Asmaroini dan Prihma. 2017. Pelaksanaan Pendidikan Demokrasi Siswa SMA di Kabupaten Ponorogo. JPPKn Vol.2, No.2, Desember 2017. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Asriyati. 2021. Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila dalam Pemilihan Ketua Osis di SMP Swasta Muhammadiyah Kota Kupang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Nusa Cendana.

- Budiarti, Amalia Putri. 2017. "Implementasi Nilai-nilai Demokrasi dalam Pemilihan Ketua OSIS di SMP Negeri 38 Semarang Tahun 2016". Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press
- Giddens, Anthony. 1998. *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Nurdin & Khoirul. 2020. Pendidikan Demokrasi Pada Tingkat Sekolah Menengah atas (Studi Pada Pemilihan Ketua OSIS Di SMA Negeri 1 Sinjai). *Jurnal Sosial dan politik Al-Qisthi*. Vol. 10 no. 1 Jun 20. Hal 32-51.
- Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhalindo.
- Sarbaini, dkk. 2015. Persepsi Siswa Terhadap Pemilihan Ketua OSIS di SMA KORPRI Banjarmasin Dilihat dari Nilai – Nilai Demokrasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 5, Nomor 10 Nov 2015*. hal 811 - 816
- Surat Keputusan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 510/SK.PP/III.A/16/1997 tanggal 03 Oktober tahun 1997 "Qoidah Pendidikan Dasar dan Menengah."
- Tukiran, dkk. 2017. Pengembangan Nilai-nilai Demokrasi dengan Model Pembelajaran Diskusi Kelas. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta: 11 November 2017*. 191-198.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Walgito, Bimo. 1989. *Pengantar Psikologi Umum*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Yuniarto, Bambang. 2018. *Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zamroni, 2011. *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Jakarta: Gavin Kalam Utama.